UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Penilaian Dokumen Pelayanan Perpindahan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul**
Arromah Saniyati, Rina Rakhmawati, S.Hum, M.P.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Penelitian ini membahas proses penilaian dan penyusutan pada dokumen pelayanan perpindahan penduduk periode 2015-2019 yang selesai masa retensinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penentuan nilai guna dan masa simpan dokumen pelayanan dari sudut pandang tim penilai sebagai dasar penetapan nasib akhir. Proyek akhir ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian dan penyusutan dokumen pelayanan perpindahan penduduk dilakukan antara unit pengolah, arsiparis, dan lembaga kearsipan daerah. Dokumen pelayanan perpindahan penduduk telah melalui masa simpan yakni dua tahun aktif dan tiga tahun inaktif sehingga dilakukan penilaian dan penyusutan. Berdasarkan hasil penilaian, dokumen layanan memiliki keputusan akhir untuk dimusnahkan. Pertimbangan penilaian didasarkan pada nilai guna dan masa simpan yang terdapat pada jadwal retensi arsip. Dokumen pelayanan perpindahan penduduk mengalami penurunan nilai guna administrasi setelah produk akhir pelayanan terbit sehingga tidak lagi diperlukan untuk kegiatan operasional. Selain itu, dokumen dinilai tidak memenuhi kriteria atau karakteristik nilai guna sekunder karena tidak memuat nilai pembuktian dan informasi yang berkelanjutan. Pelaksanaan penilaian dan penyusutan memiliki beberapa kendala dalam pra-penyusutan, antara lain penumpukan dokumen layanan serta dualisme pedoman yang memiliki nasib akhir berbeda pada jenis dokumen pelayanan yang sama. Pedoman tersebut termuat pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi Arip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses arip serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Kata kunci: penilaian arsip, penyusutan arsip , nilai guna, dokumen pelayanan perpindahan penduduk

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Penilaian Dokumen Pelayanan Perpindahan Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul**
Arromah Saniyati, Rina Rakhmawati, S.Hum, M.P.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

This study examines the appraisal and disposal process for population migration service documents from 2015 to 2019 that have reached the end of their retention period at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul. The purpose of this study is to describe how the useful value and retention period of service documents are determined from the perspective of the appraisal team as the basis for final disposal. This final project employs a qualitative method using a case study approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews and a literature review. Data analysis involved data condensation, data presentation, and the drawing of conclusions and verification.

This study shows that the appraisal and disposal population migration service documents are carried out jointly by processing units, archivists, and regional archival institutions of population migration service documents have completed their retention periods—two years for active records and three years for inactive records—and are therefore subject to appraisal and disposal. Based on the appraisal results, a final decision was made to destroy these service documents. The appraisal considerations were based on the record value and retention periods specified in the records retention schedule of population migration service documents lose their administrative record value once the final service output is issued, making them no longer necessary for operational activities. Additionally, the documents were deemed not to meet the criteria or characteristics of secondary record value because they do not contain evidential value or ongoing information. The implementation of the assessment and disposal process faces several challenges during the pre-disposal phase, including the accumulation of documents service and conflicting guidelines that result in different final dispositions for the same type of service document. These guidelines are contained in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2024 on the Records Retention Schedule and the Records Security and Access Classification System, as well as Bantul Regent Regulation No. 183 of 2021 on the Records Retention Schedule.

Keyword: *record appraisal, disposition, records value, population migration service document*